

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perusahaan yang ingin bertahan didunia bisnis tidak akan berhenti, tetapi berinvestasi dengan dana yang ada agar terus berkembang (Silaban and Purnawati, 2016). Berbicara tentang investasi, tentu akan berkaitan dengan keputusan pembagian dividen yang didasarkan pada keuntungan yang diinvestasikan.

Pentingnya keputusan dalam membagikan dividen dapat mempengaruhi investor dan perseroan yang akan membagikan dividen. Dimana pembagian dividen yang setimbang menunjukkan bahwa perseroan dan manajemen perusahaan berkinerja dengan baik (Monika and Sudjarni, 2018). Nilai perusahaan dapat tercermin dari mampunya suatu perusahaan dalam membayar dividen setiap tahunnya.

Salah satu hal yang dikhawatirkan oleh perusahaan dalam menetapkan kebijakan dividen yaitu tentang keputusan berapa banyak laba yang dibagikan dan berapa yang akan tahan. Dimana, laba yang didistribusikan ke laba ditahan akan digunakan untuk reinvestasi dalam aset yang menguntungkan (Sari, 2021). Untuk dapat menetapkan kebijakan dividen yang tepat maka, manajemen internal perusahaan harus memperhatikan faktor yang dimiliki oleh internal perusahaan terkait pengelolaan manajemen yang baik disebut dengan *good corporate governance* dan profitabilitas. Dimana, menurut (Sari *et al*, 2019) ukuran tentang efesiensi tata kelola perusahaan berasal dari indikator profitabilitas perusahaan.

Implementasi GCG adalah salah satu cara untuk mencegah situasi yang tidak dapat didamaikan dan ketidakseimbangan data dalam organisasi (Mahrani and Soewarno 2018). Sehingga hal itu dapat memaksimalkan kinerja perusahaan serta efesiensi keuangan yang menunjang peningkatan berbagai hubungan manajemen, shareholder, dewan direksi, dan lainnya. Selain GCG, faktor yang harus diperhatikan adalah tingkat profitabilitas yang tercermin dari suatu perusahaan. Dimana tingginya daya laba dapat mengirimkan sinyal yang menguntungkan kepada penanam modal, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para penanam modal tersebut (Lubis dkk, 2017).

Berdasarkan tabel 1.1 fenomena (terlampir) penelitian terkait kebijakan dividen ini dilaksanakan pada sektor perusahaan industri barang konsumsi di BEI pada perusahaan JPFA, KI dan KM tahun 2019-2020 mengalami peningkatan tetapi DPR mengalami penurunan dari 0,3388 menjadi 0,2115 dimana seharusnya diharapkan bahwa dengan KI dan KM yang tinggi maka DPR juga tinggi. Kemudian pada perusahaan AMRT komisaris independen tahun 2017 yaitu 0,5000 meningkat menjadi 0,6000 tahun 2018, tetapi tidak diikuti dengan DPR yang menurun sehingga menunjukkan adanya masalah yang terjadi antara kenaikan KOMIND yang tidak diikuti oleh DPR yang menurun. Selanjutnya, pada perusahaan INDF, RA tahun 2018 sebanyak 5 meningkat tahun 2019 menjadi 7 tetapi tidak diikuti dengan ROA dan DPR yang mengalami penurunan.

Penelitian tentang kebijakan dividen telah dikerjakan oleh sebagian penelitian sebelumnya yang membahas tentang kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Dividend Payout Ratio*. Riset yang dilakukan oleh Gunawan dkk, (2018); Ramandini, (2019); Avilla and Utama, (2022), menunjukkan bahwa variabel GCG berpengaruh positif signifikan pada DPR. Tetapi bertentangan dengan riset oleh (Dewayanto, 2020) dimana CG tidak memiliki pengaruh pada kebijakan dividen. Ketidakkonsistenan hasil dari riset sebelumnya adalah dasar dalam melakukan pengujian kembali pada variabel penelitian ini dengan pembaharuan pada variabel profitabilitas yang digunakan sebagai variabel moderator yang memoderasi antara variabel GCG dan kebijakan dividen.

I.2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh GCG terhadap keputusan pembagian deviden perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI?
- b. Bagaimana pengaruh GCG terhadap keputusan pembagian dividen perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dengan tingkat profitabilitas sebagai variabel moderator?

I.3. Tinjauan Pustaka

I.3.1. *Good Corporate Governance*

Menurut Widianingsih, (2018) tata kelola perusahaan yang baik adalah perseroan mekanisme pengendalian internal. Dengan menerapkan GCG,

kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan akan meningkat (Hussain, *et al* 2018).

Indikator dari Good Corporate Governance:

a. Kepemilikan Insntitusional (KI)

Menurut Marsudi & Soetanto, (2020) kepemilikan institusional presentase kepemilikan saham oleh pemerintah. Kepemilikan insntitusional mengambil bagian dalam mengamati administrasi perusahaan dan masalah kantor untuk membangun jaminan pendukung keuangan (Katutari and Yuyetta 2019). Sumber rumus : (Susilo dkk, 2018)

$$KEPINS = \frac{\text{Kepemilikan Saham oleh Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

b. Kepemilikan Manajerial (KM)

Menurut (Thesarani, 2016) kepemilikan manajerial adalah total saham yang dipegang para autor alias dewan direksi perseroan. Kepemilikan manajerial sebagai alternative yang dapat digunakan untuk meminimalkan biaya keagenan (Febrianty and Mertha, 2021). Sumber rumus : (Wiariningsih, dkk 2019).

$$KM = \frac{\text{Kepemilikan Saham oleh Manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

c. Komisaris Independen (KID)

Komisaris independen adalah jabatan yang paling baik dalam menjalankan fungsi pemantauanatau monitoring untuk memenuhi tujuan suatu perusahaan dengan manajemen yang baik (Tambunan dkk, 2017). Komisaris independen dapat menjelaskan susunan independensi juga kenetralan dewan saat ketetapan diambil (Wati 2017). Sumber rumus : (Wati, 2020)

$$BOARD = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

d. Rapat Audit (RA)

Rapat komite audit adalah koordinasi antara anggota dalam rangka melaksanakan peran secara efesien pada pengamatan informasi finansial, pengelolaan juga pelaksanaannya pada GCG perseroan (Machmuddah *et al*, 2017). Komite audit yang antusias mengadakan rapat tentu lebih berusaha untuk memonitor pengelolaan dan pelaporan finansial (Albersmann and Hohenfels 2017). Sumber rumus : (Handoko dkk, 2017).

Rapat komite Audit = Frekuensi Pertemuan Komite Audit dalam 1 tahun

I.3.2. Keputusan Pembagian Dividen

Menurut Ayem & Nugroho, (2016) kebijakan dividen adalah penentuan jumlah laba yang dapat dibagikan dan berapa yang akan ditahan. Dividen menarik bagi pemodal dengan tujuan untuk berinvestasi disuatu perusahaan (Astika and Kirana, 2020). Sumber rumus : Musthafa, (2017:141)

$$\text{Dividend Payout Ratio} = \frac{\text{Total Dividen}}{\text{Laba Bersih}}$$

I.3.3. Tingkat Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator keuangan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan dalam suatu perusahaan selama periode waktu tertentu (Kasmir, 2017:196). Profitabilitas berpengaruh pada pembayaran dividen karena dividen bagian dari laba bersih perusahaan (Fitri *et al*, 2016). Sumber rumus : Kasmir, (2016 : 201)

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

I.4. Kerangka Konseptual (Gambar dilampiran)

I.5. Hipotesis Penelitian

Menurut penelitian Rahayu & Rusliati (2019);Chandra & Junita, (2021) mengatakan KI memiliki pengaruh positif pada DPR dimana makin besar saham institusional makin besar pula kebijakan dividen.

H1: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap DPR

Menurut Hapsari & Fidiana (2021);Hasibuan & Hakim (2021) mengatakan KM memiliki pengaruh positif dan signifikan pada DPR. Sehingga semakin banyaknya manajer yang terlibat dalam kepemilikan saham, maka pembagian dividen semakin tinggi.

H2: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap DPR

Menurut penelitian Limbong, (2021); Yuniati *et al*, (2020) mengatakan KID berpengaruh terhadap DPR. Semakin banyak komisaris independen akan pembagian dividen akan semakin tinggi pula.

H3: Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap DPR

Menurut penelitian Fernando *et al*, (2021); rapat audit memiliki pengaruh positif pada DPR. Sehingga semakin sering rapat audit diadakan semakin tinggi pula kebijakan dividennya.

H4: Rapat Audit memiliki pengaruh terhadap DPR

H5: ROA berpengaruh terhadap DPR (Teori dilampiran)

H6: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap ROA (Teori dilampiran)

H7: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ROA (Teori dilampiran)

H8: Komisaris independen berpengaruh terhadap ROA (Teori dilampiran)

H9: Rapat Audit berpengaruh terhadap ROA (Teori Terlampir)

Menurut penelitian Candradewi and Sedana (2016); Rimardhani dkk (2016) KI memiliki pengaruh positif dan signifikan pada ROA. Pengaruh KI pada DPR akan meningkat dengan adanya ROA sebagai variabel moderasi.

H10: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap DPR dengan ROA sebagai variabel moderator.

Menurut penelitian Sembiring (2020); Prihatini and Susanti (2018) mengatakan bahwa KM berpengaruh positif dan signifikan pada ROA. Pengaruh KM pada DPR akan semakin meningkat dengan adanya ROA sebagai variabel moderator.

H11: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap DPR dengan ROA sebagai variabel moderator.

Menurut penelitian Setiawan and Setiadi, (2020); Irwansyah, (2019) mengatakan bahwa KID berpengaruh positif terhadap ROA. Pengaruh komind terhadap DPR akan semakin meningkat dengan dimoderasi oleh variabel ROA.

H12: Komisaris independen berpengaruh terhadap DPR dengan ROA sebagai variabel moderator.

Menurut penelitian Shatnawi *et al*, (2020); Ofoeda *et al*, (2020) menemukan bahwa RA memiliki pengaruh positif dan signifikan pada ROA. Pengaruh RA pada DPR akan meningkat dengan adanya ROA sebagai variabel moderator.

H13: Rapat audit berpengaruh terhadap DPR dengan ROA sebagai variabel moderator.